

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
DAN KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS
TERHADAP PENGUNGKAPAN MANAJEMEN
RISIKO**

**(Studi empiris pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan
non-keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2012)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**AMALIA RATNA KUSUMANINGRUM
NIM. C2C606008**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Amalia Ratna Kusumaningrum

Nomor Induk Mahasiswa : C2C606008

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL DAN KARAKTERISTIK
DEWAN KOMISARIS TERHADAP
PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO
(Studi empiris pada laporan tahunan
perusahaan-perusahaan non-keuangan yang
terdaftar di BEI tahun 2012)**

Dosen Pembimbing : Anis Chariri, SE, M.Com, Ph.D, Akt

Semarang, 22 Agustus 2013

Dosen Pembimbing

(Anis Chariri, SE, M.Com, Ph.D, Akt)

NIP : 196708091992031001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Amalia Ratna Kusumaningrum

Nomor Induk Mahasiswa : C2C606008

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL DAN KARAKTERISTIK
DEWAN KOMISARIS TERHADAP
PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO
(Studi empiris pada laporan tahunan
perusahaan-perusahaan non-keuangan yang
terdaftar di BEI tahun 2012)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 28 Agustus 2013

Tim Penguji

1. Anis Chariri, SE, M.Com, Ph.D, Akt (.....)

2. Dr. Rahardja., Msi, Akt (.....)

3. Faisal., Msi, Ph.D, Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Amalia Ratna Kusumaningrum, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO (Studi empiris pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2012)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulisan lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 22 Agustus 2013

(Amalia Ratna Kusumaningrum)

NIM : C2C606008

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (QS.2:286)

"Ilmu Pengetahuan tanpa agama adalah buta, tetapi agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh" (Albert Einsten)

"Orang yang tidak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah mencoba hal baru" (Albert Einsten)

"When you really believe or want something the universe will conspire to help you" (Paulo Coelho)

Skripsi ini saya persembahkan untuk
Keluargaku tercinta dan sahabat dekatku :

Bapak Kusuma Adji, Ibu Sulistyaningsih,
Adikku Silvia Syarifah Kusumaputri, dan
Ghalih Fahrul Huda serta Sandra Devi

Damayanti

ABSTRACT

Along with the development of the company and the business environment investors are more careful to put the investment in the company to prioritize disclosures in the financial statements. One of the important information that is of particular concern for investors is the non-financial segment of the annual report (Amran et al., 2009). This research purpose to get emprical proof about the factors which influential risk disclosure in the risk management report that is, institutional investors, independent commissioner, commissioner's education background and commissioner's experience on the risk management disclosure.

This research use purposive sampling in carry out sample selection. Total population in this study were 387 non-financial firms and the samples used in this research were 77 non-financial companies in 2012. Agency theory and resource dependence theory is used to explain connection inter variable. Act of risk disclosure in this research use content analysis based on the identification of setences act of risk disclosure in the annual report. Statistic method is use for examine hypothesis is bifilar regression.

The test results shows that the risk management disclosure level in Indonesia is relatively high. This study provides evidence that institutional investors play a more effective role in monitoring the company's risk management disclosure compared to the board of directors. The results also show that commissioner's education background and commissioner's experience are attributes associated with risk managemen disclosure.

*Keywords : Corporate Governance, Institutional Investors, Board of Directors,
Risk Management Disclosure*

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan perusahaan dan lingkungan bisnis investor lebih berhati-hati dalam menempatkan investasi di dalam perusahaan sehingga lebih memprioritaskan pengungkapan pada laporan keuangan. Salah satu informasi penting yang menjadi perhatian khusus bagi investor adalah segmen non-keuangan dari laporan tahunan (Amran et al., 2009). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan risiko di dalam laporan manajemen risiko yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, latar belakang pendidikan dewan komisaris dan pengalaman dewan komisaris komisaris.

Penelitian ini menggunakan purposive sampling dalam melakukan pemilihan sampel. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 387 perusahaan non-keuangan dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 77 perusahaan non-keuangan pada tahun 2012. Teori keagenan dan teori ketergantungan sumber daya digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Pengungkapan risiko dalam penelitian ini menggunakan *content analysis* didasarkan pada pengidentifikasian kalimat-kalimat pengungkapan risiko dalam laporan tahunan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi berganda.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan manajemen risiko di Indonesia relatif tinggi. Studi ini memberikan bukti bahwa kepemilikan institusional memainkan peran yang lebih efektif dalam memantau pengungkapan manajemen risiko perusahaan dibandingkan dengan dewan komisaris. Hasil penelitian juga menunjukkan latar belakang pendidikan dewan komisaris dan pengalaman dewan komisaris memiliki keterkaitan pengungkapan manajemen risiko.

Kata kunci : Tata Kelola Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Pengungkapan Manajemen Risiko

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin. Terucap syukur yang mendalam kepada Allah SWT, yang telah memberikan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko (Studi empiris pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2012)”** dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang dan dosen wali yang telah memberikan pengarahan dan dorongan selama masa studi penulis.
2. Prof. Dr. Muchammad Syarifuddin, M. Si, Akt, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Anis Chariri, SE, M.Com, Ph.D, Akt, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan, bimbingan, kritikan, dan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruf staf dosen dan pengajar Jurusan Akuntansi Universitas Fakultas Ekonomika dan Bisnis Diponegoro Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjalani masa studi.
6. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Kusuma Adji dan Ibu Sulistyaningsih, terima kasih atas kasih sayang, doa, dorongan, pengorbanan, perjuangan, pengertian dan dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan masa studi ini.
7. Saudara perempuanku, Silvia Syarifah Kusumaputri untuk dukungan, dorongan dan doa yang telah diberikan kepada penulis.
8. Seluruh keluarga besarku dari Ayah juga Ibu yang turut mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman Akuntansi Reguler II atas keceriaan, kebersamaan serta bantuan yang telah diberikan.
10. Sahabat-sahabatku di Semarang, Ghalih, Sandra, Rina, Okta, Nisa, Intan, Seto, Agy, Salman yang telah memberikan bantuan dan semangat selama masa perkuliahan.

11. Teman-teman tim I Tahun 2012/2013 Desa Keniten Kabupaten Batang, yang telah bersama-sama selama 30 hari sehingga banyak pelajaran yang dipetik oleh penulis.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak, yang telah membantu hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 22 Agustus 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II TELAAH PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	9

2.1.2	Teori Ketergantungan pada Sumber Daya (<i>Resource Dependence Theory</i>)	12
2.1.3	Manajemen Risiko	13
2.1.4	Pengungkapan Manajemen Risiko	16
2.1.5	Kepemilikan Institusional	22
2.1.6	Komisaris Independen	24
2.1.7	Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris	26
2.1.8	Pengalaman Dewan Komisaris	27
2.2	Penelitian Terdahulu	27
2.3	Kerangka Pemikiran	32
2.4	Hipotesis	34
2.4.1	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko.....	34
2.4.2	Pengaruh Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko.....	35
2.4.3	Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko	36
2.4.4	Pengaruh Pengalaman Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko	36
BAB III	METODE PENELITIAN	38
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	38
3.1.1	Variabel Penelitian	38

3.1.2	Variabel Dependen	39
3.1.3	Variabel Independen	43
3.1.3.1	Kepemilikan Institusional	43
3.1.3.2	Komisaris Independen	44
3.1.3.3	Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris	44
3.1.3.4	Pengalaman Dewan Komisaris	45
3.2	Populasi dan Sampel	45
3.3	Jenis dan Sumber Data	46
3.4	Metode Pengumpulan Data	47
3.5	Metode Analisis	47
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	47
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	48
3.5.2.1	Uji Normalitas	48
3.5.2.2	Uji Multikolinieritas	49
3.5.2.3	Uji Heteroskedastisitas	49
3.5.3	Analisis Regresi Berganda	49
3.5.4	Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	50
3.5.5	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	51
3.5.6	Uji Parsial (Uji t)	51
3.5.7	Uji Hipotesis	52
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	53
4.1.1	Deskripsi Umum Penelitian	53

4.1.2	Deskripsi Sampel Penelitian	54
4.2	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	60
4.3	Hasil Uji Asumsi Klasik	63
4.3.1	Hasil Uji Normalitas	64
4.3.2	Hasil Uji Multikolinier	66
4.3.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	67
4.4	Analisis Regresi Berganda	68
4.5	Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	69
4.6	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	70
4.7	Hasil Uji Parsial (Uji t)	71
4.8	Hasil Uji Hipotesis	72
4.9	Interpretasi Hasil	74
4.9.1	Pengaruh Kepemilikan Saham Institusi terhadap Pengungkapan risiko.....	75
4.9.2	Pengaruh Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko	76
4.9.3	Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko	77
4.9.4	Pengaruh Pengalaman Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko	79
BAB V	PENUTUP	81
5.1	Kesimpulan	81
5.2	Keterbatasan	82

5.3 Implikasi	83
5.4 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Peraturan Pengungkapan Risiko di Beberapa Negara	18
Tabel 2.2	Peraturan Pengungkapan Risiko di Indonesia	20
Tabel 2.3	Ringkasan Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1	Jenis Risiko Berdasarkan Pengungkapan Wajib dan Sukarela ...	41
Tabel 3.2	Batasan Dalam Pengungkapan Risiko Perusahaan	42
Tabel 4.1	Perusahaan Non-Keuangan di BEI tahun 2012	53
Tabel 4.2	Penentuan Pemilihan Sampel Penelitian	55
Tabel 4.3	Distribusi Sampel Berdasarkan Jenis Usaha	55
Tabel 4.4	Nilai Persentase Risiko Keuangan Perusahaan (Pengungkapan Wajib / <i>Mandatory Disclosure</i>)	56
Tabel 4.5	Nilai Masing-Masing Pengungkapan Sukarela Perusahaan (<i>Voluntary Disclosure</i>)	57
Tabel 4.6	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	60
Tabel 4.7	Proporsi Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris	62
Tabel 4.8	Proporsi Pengalaman Dewan Komisaris	63
Tabel 4.9	Hasil Uji <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i>	66
Tabel 4.10	Pengujian Multikolinieritas	67
Tabel 4.11	Model Penelitian Regresi Berganda	69
Tabel 4.12	Hasil Uji Simultan (Uji F)	70
Tabel 4.13	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	71
Tabel 4.14	Persamaan Regresi Berganda	72
Tabel 4.15	Hasil Uji Hipotesis	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Penelitian	33
Gambar 4.1	Nilai Persentase Pengungkapan Wajib dan Pengungkapan Sukarela	58
Gambar 4.2	Letak Pengungkapan Manajemen Risiko	59
Gambar 4.3	Grafik Histogram	64
Gambar 4.4	Grafik Normal Probability Plot	65
Gambar 4.5	Hasil Uji Heteroskedastisitas	68

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A	Data Sekunder Variabel Penelitian	91
LAMPIRAN B	Hasil SPSS	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perusahaan dan lingkungan bisnis investor lebih berhati-hati dalam menempatkan investasi di dalam perusahaan sehingga lebih memprioritaskan pengungkapan pada laporan keuangan. Salah satu informasi penting yang menjadi perhatian khusus bagi investor adalah segmen non-keuangan dari laporan tahunan (Amran et al., 2009), terutama pada *corporate governance*. Informasi yang berkaitan dengan *corporate governance* seperti sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko dapat meyakinkan investor bahwa organisasi bebas dari penyimpangan akuntansi. Dobler (2008) menyatakan bahwa salah satu faktor dalam pengungkapan perusahaan adalah manajemen risiko. Pelaporan risiko penting untuk menginformasikan investor tentang efek risiko pada posisi keuangan masa depan perusahaan.

Strategi manajemen risiko telah lama diteliti dalam batas-batas internal perusahaan sebagai keputusan manajerial penting karena risiko hadir di hampir setiap aspek operasi bisnis. Sekarang ini perhatian penelitian telah diarahkan untuk pengelolaan dan pengendalian risiko dari sudut pandang eksternal, dan khususnya dari sudut pandang para pemangku kepentingan (Lajili dan Zeghal, 2005).

Menurut Lajili dan Zeghal (2005) pengungkapan risiko manajemen memberikan panduan dalam mengevaluasi efektifitas manajemen dalam menangani tingginya volatilitas pasar dan ketidakpastian bisnis dan dampaknya terhadap tingkat nilai perusahaan dan pertumbuhan ekonomi, serta sensitivitas volume perdagangan terhadap risiko yang berbeda. Sebagai bagian dari *good corporate governance*, informasi pengelolaan risiko ini diharapkan semakin diminati oleh para pemangku kepentingan perusahaan dan pengguna informasi secara umum, untuk memperoleh informasi relevan seperti risiko dan strategi pengendalian yang mungkin sengaja ditahan oleh manajemen untuk tujuan strategi. Hal ini akan membantu mengidentifikasi potensi masalah manajerial dan menilai efektifitas manajemen dalam menangani ketidakpastian bisnis dan peluang.

Sistem manajemen risiko yang efektif merupakan suatu kekuatan perusahaan yang dapat membantu dalam pencapaian tujuan bisnis perusahaan serta peningkatan kualitas pelaporan keuangan sebagai usaha perlindungan reputasi perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009). Oleh karena itu, aspek pengawasan merupakan kunci penting demi berjalannya sistem manajemen risiko perusahaan yang efektif (Andarini, 2010).

Menurut Anisa (2012) pengungkapan informasi risiko harus memadai agar dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan yang cermat dan tepat. Pengungkapan informasi risiko perusahaan perlu dilakukan secara berimbang. Hal ini berarti informasi yang disampaikan bukan hanya yang bersifat positif saja namun termasuk informasi yang bersifat negatif terutama yang terkait dengan

aspek risiko manajemen. Permintaan para pemegang saham terhadap pengungkapan yang lebih transparan dalam laporan keuangan membuat perusahaan-perusahaan melakukan perluasan terhadap wilayah pengungkapannya dalam laporan tahunan, dengan membuat pengungkapan mengenai informasi-informasi non-keuangan yang dianggap lebih relevan dan transparan sebagai bentuk pertimbangan dalam pembuatan keputusan.

Terlepas dari monitor eksternal, pihak internal yang terlibat dengan manajemen perusahaan adalah orang-orang terbaik untuk secara konsisten memantau praktik pengungkapan manajemen risiko perusahaan. Raber (2003) menyarankan bahwa dewan komisaris yang efektif harus melaksanakan peran mereka dalam memastikan bahwa mereka telah melaksanakan tugasnya dalam keputusan monitoring serta manajemen risiko. Hal ini karena dewan komisaris bertindak sebagai proksi untuk pemegang saham mereka. Menurut teori keagenan, kehadiran seorang *board of directors*¹ diharapkan dapat mengawasi manajemen dan melindungi kepentingan pemegang saham (Fama dan Jensen, 1983). Teori ketergantungan terhadap sumber daya juga menyediakan argumen bahwa komisaris independen akan lebih menguntungkan karena keahlian, *prestise* dan hubungan sosial mereka.

Perkembangan dalam permintaan pengungkapan ini telah menyebabkan ketertarikan para peneliti untuk menginvestigasi praktik pengungkapan yang terjadi di dalam perusahaan dalam bidang-bidang seperti *corporate social responsibility*, *corporate governance*, *intellectual capital* dan manajemen risiko.

¹ Pada model *single board*, *board of directors* adalah identik dengan dewan komisaris pada model *dual board* seperti kasus *Good Corporate Governance* di Indonesia.

Namun demikian, pengungkapan dalam bidang manajemen risiko merupakan topik yang paling sedikit diteliti (Linsley dan Shrivess, 2006 dalam Amran *et al*, 2009) meski topik tentang manajemen risiko telah banyak dibicarakan.

Interaksi pihak eksternal yang independen dari manajemen menjadi elemen terpenting dalam memantau sistem dan pengungkapan manajemen risiko. Salah satu pihak eksternal yang memainkan peranan penting adalah investor institusional yang sering diproksi dengan kepemilikan institusional. Menurut Abraham dan Cox (2007), peran kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan memainkan pengaruh yang besar pada pengungkapan manajemen risiko karena aksesibilitas mereka dalam proses partisipasi pengambilan keputusan di manajemen tingkat atas.

Penelitian pengungkapan manajemen risiko telah dilakukan di beberapa negara. Salah satunya penelitian yang dilakukan Lajili dan Zegal (2005) menunjukkan bahwa pada laporan tahunan perusahaan di Kanada hanya ada 82.46% pengungkapan manajemen risiko di dalam catatan atas laporan keuangan. Lajili dan Zegal (2005) juga menemukan bahwa risiko keuangan merupakan risiko yang paling sering diungkapkan oleh perusahaan dan yang termasuk diantaranya berkaitan dengan risiko dalam mata uang asing. Penelitian yang dilakukan Amran *et al* (2009) mengenai pengungkapan manajemen risiko dalam laporan tahunan perusahaan di Malaysia menemukan adanya hubungan signifikan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan risiko.

Penelitian tentang pengungkapan manajemen risiko di Indonesia telah mulai berkembang. Angraini (2006) melakukan penelitian tentang pengungkapan

informasi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan. Anggraini (2006) menemukan variabel kepemilikan manajemen, *financial leverage*, biaya politik, profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan. Almilia dan Retrinasari (2007) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Anisa (2012) yang melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko dimana menambahkan variabel profitabilitas dan struktur kepemilikan. Namun demikian, penelitian diatas mengabaikan variabel karakteristik dewan komisaris seperti komisaris independen, latar belakang pendidikan dewan komisaris dan pengalaman dewan komisaris.

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian serupa yang dilakukan oleh Ismail dan Rahman (2011). Penelitian ini menguji hubungan tingkat pengungkapan risiko dengan fungsi pemantauan pihak internal maupun eksternal, yaitu kepemilikan institusional dan dewan komisaris. Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman peran pemantauan bahwa pihak internal dan eksternal dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan manajemen risiko. Secara khusus, studi ini berfokus pada manajemen risiko keseluruhan yang meliputi pengungkapan dan mengukur tingkat risiko dengan cara checklist pengungkapan manajemen risiko.

Adapun variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu pengungkapan manajemen risiko sebagai variabel dependen sedangkan variabel independennya adalah kepemilikan institusional dan karakteristik dewan

komisaris seperti komisaris independen, latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dewan komisaris dan pengalaman dewan komisaris.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan manajemen risiko dalam perusahaan?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan manajemen risiko dalam perusahaan?
3. Apakah latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko dalam perusahaan?
4. Apakah pengalaman dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko dalam perusahaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji efek dari fungsi pengawasan dari kepemilikan institusional dan karakteristik dewan komisaris pada tingkat pengungkapan manajemen risiko di antara perusahaan publik di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini menguji :

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap tingkat pengungkapan manajemen risiko dalam perusahaan.

2. Pengaruh komisaris independen terhadap tingkat pengungkapan manajemen risiko dalam perusahaan.
3. Pengaruh latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dewan komisaris terhadap pengungkapan manajemen risiko dalam perusahaan.
4. Pengaruh pengalaman dewan komisaris terhadap pengungkapan manajemen risiko dalam perusahaan.

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan kontribusi sebagai berikut :

1. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman peran pemantauan yang dilakukan pihak eksternal (Kepemilikan Institusional) dan pihak internal (Karakteristik Dewan Komisaris) dalam pengungkapan manajemen risiko.
2. Penelitian ini dapat memperlihatkan seberapa luas perusahaan di Indonesia dalam pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) manajemen risiko perusahaan.
3. Hasil dari penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu sehingga dapat mengetahui letak perbedaan hasilnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam penyusunan karya ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari bab pertama hingga bab terakhir. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian , serta sistematika penulisan.
2. Bab II : Telaah Pustaka, bab ini mengemukakan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diusulkan.
3. Bab III : Metode Penelitian, bab ini akan menjelaskan berbagai variabel penelitian dan definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut, penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan.
4. Bab IV : Hasil dan Pembahasan, bab ini akan menjelaskan deskripsi uji penelitian, analisis data dan pembahasan yang didasarkan atas hasil penelitian data.
5. Bab V : Penutup, bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principle* dan *agents*. Pihak *principle* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976).

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005) teori keagenan memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan *principal* dan *agent*. Dalam asumsi teori keagenan yang melekat adalah terdapatnya pertentangan antara pemilik usaha (pemegang saham) dengan manajer. Pertentangan ini timbul karena adanya keinginan dari para manajer untuk memaksimalkan tingkat kepuasannya sendiri. Dan di pihak lain, para pemegang saham menginginkan untuk memaksimalkan keuntungannya, pertentangan kemudian timbul apabila keputusan yang dibuat oleh para manajer guna memaksimalkan kepuasannya sendiri tersebut ternyata tidak mensejahterakan pemegang saham (Kiswara, 1999).

Kesalahan pengambilan keputusan karena para pengambil keputusan yang tidak ikut serta dalam menanggung risiko biasanya dapat menyebabkan konflik

didalam teori keagenan. Menurut para pengambil keputusan (manajer) risiko tersebut seharusnya ditanggung oleh para pemilik saham. Hal inilah yang menimbulkan ketidaksinkronan antara pihak pengambilan keputusan (manajer) dengan para pemilik saham (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik keagenan timbul dari beberapa hal berikut ini :

1. *Moral Hazard*

Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang tinggi), dimana manajer melakukan kegiatan yang tidak diketahui seluruhnya oleh pemegang saham. Sehingga manajemen dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma tidak layak dilakukan.

2. Penahanan Laba (*Earning Retention*)

Masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen melalui peningkatan dana pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, *prestise*, atau memperbesar kemampuan untuk mendominasi dewan komisaris, maupun penghargaan bagi dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan *principal*.

3. *Time Horizon*

Konflik ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas, dimana *principal* lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti, sedangkan manajemen cenderung menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

4. *Risk Aversion*

Manajemen cenderung mengambil posisi aman untuk mereka sendiri dalam mengambil keputusan investasi. Dalam hal ini, mereka akan mengambil keputusan investasi yang sangat aman dan masih dalam kemampuan manajer. Mereka akan menghindari keputusan investasi yang dianggap menambah risiko bagi perusahaannya walaupun mungkin hal itu bukan pilihan yang terbaik bagi perusahaan.

Konflik antara pemilik saham dengan pihak manajemen perusahaan dapat diminimalkan dengan cara, manajer harus menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham begitupula dalam pengambilan keputusan oleh manajer harus disesuaikan dengan kepentingan pemegang saham. Dalam menjalankan perusahaan manajer juga dapat dimonitor oleh para pemegang saham.

Teori agensi secara umum dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu di dalam mekanisme pengawasan internal perusahaan yang berfungsi untuk menyediakan kualitas pengawasan yang lebih baik dan menurunkan perilaku yang berpotensi destruktif dari manajer. Komite - komite yang dibentuk oleh dewan komisaris diperkirakan ada dalam situasi dimana biaya keagenan tinggi seperti leverage tinggi, serta kompleksitas dan ukuran perusahaan yang lebih besar (Subramaniam et al , 2009).

Menurut Fama and Jensen (dalam Firth and Rui, 2006) teori keagenan juga mengemukakan bahwa sebuah moral *hazard* yang melekat dalam hubungan *principal* dan *agent* dapat menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Sebuah

komite audit merupakan salah satu cara untuk mengurangi masalah biaya keagenan ini. Sebuah komite audit yang efektif dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan hal ini dapat membantu pekerjaan dewan komisaris yang bertugas menjaga dan memajukan kepentingan para pemegang saham (Setyarini, 2011).

2.1.2 Teori Ketergantungan pada Sumber Daya (*Resource Dependence Theory*)

Teori ketergantungan sumber daya (*Resource Dependence Theory*) dikemukakan oleh Pfeffer and Selancik (1978) dalam (Fajariyah, 2012). Teori ini fokus pada hubungan antara organisasi dan sumber lingkungannya. Pfeffer and Selancik (1978) mengemukakan bahwa jika ingin memahami keputusan dan tindakan organisasi, harus mengurangi analisis dinamika internal organisasi atau nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan para pemimpinnya tetapi lebih banyak menganalisis situasi di mana organisasi itu berada dan tekanan maupun hambatan yang muncul dari situasi itu.

Menurut Pfeffer dan Selancik (1978) karakteristik teori ketergantungan sumber daya (*resource dependence theory*) adalah pentingnya lingkungan atau konteks sosial organisasi untuk memahami keputusan apa yang harus diambil terkait dengan persoalan mulai dari siapa yang harus dipekerjakan, susunan dewan direksi, dan mitra. Kebutuhan akan sumber daya, antara lain sumber finansial dan fisik maupun informasi yang didapat dari lingkungannya, membuat organisasi menjadi tergantung pada sumber daya dari luar ini.

Teori ini berkonsentrasi pada peran dewan komisaris dalam memberikan akses ke sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan (Abdullah dan Valentine, 2009). Hilman et al. (2000) berpendapat bahwa teori ketergantungan sumber daya berfokus pada peran bahwa direksi dalam menyediakan atau mengamankan sumber daya penting untuk organisasi melalui hubungan mereka dengan lingkungan eksternal mereka. Teori ini menyatakan bahwa organisasi saling bergantung dengan lingkungan mereka dan organisasi lain untuk kelangsungan hidup mereka karena mereka tidak dapat bergantung pada dirinya sendiri (Pugh dan Hickson, 1997).

Teori ini mengusulkan bahwa dewan perusahaan adalah sebuah mekanisme untuk mengelola ketergantungan eksternal (Pfeffer dan Salancik, 1978), mengurangi ketidakpastian lingkungan dan interdependensi lingkungan. Dalam konteks manajemen risiko, teori ini memprediksi bahwa dewan komisaris akan lebih menguntungkan dalam pengungkapan manajemen resiko karena keahlian, *prestise* dan hubungan sosial mereka.

2.1.3 Manajemen Risiko

Risiko merupakan elemen yang selalu ada dalam dunia usaha. Agar risiko yang bersifat negatif tidak menghalangi aktivitas perusahaan, risiko harus dikelola dengan baik oleh manajemen perusahaan. Pihak manajemen perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai risiko apa saja yang akan dihadapi perusahaan, apa dampak risiko-risiko tersebut bagi perusahaan, risiko mana yang harus dihadapi sendiri oleh perusahaan dan mana yang harus dipindahkan ke pihak lain,

serta metode apa yang tepat digunakan untuk menanggulangi risiko-risiko tersebut (Taures, 2011).

Manajemen risiko memiliki beberapa definisi. Menurut Smith (1990) (dalam Darmawi, 2005), manajemen risiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Menurut Clough dan Sears (1994) (dalam Darmawi, 2005), manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian. Menurut William, et.al. (1995) (dalam Darmawi, 2005), manajemen risiko juga merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi. Menurut Dorfman (1998) (dalam Darmawi, 2005), manajemen risiko dikatakan sebagai suatu proses logis dalam usahanya untuk memahami eksposur terhadap suatu kerugian.

Manajemen risiko adalah sebuah cara yang sistematis dalam memandang sebuah risiko dan menentukan dengan tepat penanganan risiko tersebut. Ini merupakan sebuah sarana untuk mengidentifikasi sumber dari risiko dan ketidakpastian, dan memperkirakan dampak yang ditimbulkan dan mengembangkan respon yang harus dilakukan untuk menanggapi risiko (Uher, 1996). Pendekatan sistematis mengenai manajemen risiko dibagi menjadi 3 stage utama, yaitu (Soeharto, 1999) (dalam Darmawi, 2005) :

1. Identifikasi risiko
2. Analisa dan evaluasi risiko
3. Respon atau reaksi untuk menanggulangi risiko tersebut

Menurut Darmawi (2005) manfaat manajemen risiko terhadap yaitu :

1. Manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan.
2. Manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba.
3. Manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung.
4. Adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya perlindungan terhadap risiko murni, merupakan harta non-material bagi perusahaan itu.
5. Manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni, dan karena kreditur pelanggan dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang dilindungi maka secara tidak langsung menolong meningkatkan *public image*.

Sukanto (1987) (dalam Darmawi, 2005) menyebutkan bahwa inti dari manajemen risiko perusahaan adalah bahwa setiap entitas memiliki nilai untuk *stakeholder*. Semua entitas selalu menghadapi ketidakpastian dan yang menjadi tantangan adalah bagaimana mengelola, mengidentifikasi, seberapa besar kemungkinan ketidakpastian yang mungkin diterima untuk meningkatkan nilai *stakeholder*. Manajemen risiko perusahaan membuat pengelolaan ketidakpastian menjadi lebih efektif terkait dengan risiko dan peluang dengan tujuan untuk mempertinggi nilai. Oleh karena itu, struktur manajemen risiko yang tepat dapat membantu dalam mengelola risiko bisnis secara lebih efektif dan mengungkapkan

hasil manajemen risiko kepada *stakeholders* organisasi (Subramaniam *et al.*, 2009).

Manajemen risiko yang dipilih setiap perusahaan umumnya berbeda satu sama lain, walaupun perusahaan-perusahaan tersebut dalam industri yang sejenis di mana memungkinkan menghadapi risiko yang serupa. Hal ini dikarenakan, manajemen yang berbeda memiliki strategi pengelolaan, toleransi terhadap risiko, dan tujuan yang berbeda pula, sehingga penting bagi kepemilikan untuk lebih memperhatikan kunci risiko bisnis dan bagaimana setiap risiko dikelola oleh perusahaan.

2.1.4 Pengungkapan Manajemen Risiko

Salah satu aspek penting di dalam pengelolaan risiko adalah pelaporan risiko (pengungkapan risiko dalam laporan tahunan). Perusahaan dikatakan telah mengungkapkan risiko jika pembaca laporan tahunan diberi informasi mengenai kesempatan atau prospek, bahaya, kerugian, ancaman atau eksposur, yang akan berdampak bagi perusahaan sekarang maupun masa mendatang (Linsley dan Shrives, 2006). Pentingnya pengungkapan risiko mulai menjadi topik utama sejak tahun 1998 ketika *Institute of Chartered Accountants in England and Wales* (ICAEW) mempublikasikan sebuah *discussion paper* berjudul “*Financial Reporting of Risk - Proposals for a Statement of Business Risk*”. ICAEW menyarankan kepada direksi untuk menyediakan informasi manajemen risiko pada laporan tahunan untuk memfasilitasi para *stakeholder* membuat keputusan (Linsley dan Shrives, 2006 dalam Amran *et al.*, 2009).

Pengungkapan risiko merupakan hal yang penting dalam pelaporan keuangan, karena pengungkapan risiko perusahaan adalah dasar dari praktik akuntansi dan investasi (ICAEW, 1999 dalam Abraham dan Cox, 2007). Manfaat pengungkapan risiko menurut Belkaoui (2000) yaitu :

1. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan untuk menyediakan ukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam laporan keuangan.
2. Untuk menjelaskan item-item yang belum diakui dan untuk menyediakan ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut.
3. Untuk menyediakan informasi untuk membantu kepemilikan dan kreditor dalam menentukan risiko dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui.
4. Untuk menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun.
5. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar di masa mendatang.
6. Untuk membantu kepemilikan dalam menetapkan *return* dan investasinya.

Peraturan pengungkapan risiko di beberapa negara telah menunjukkan keseriusan dunia terhadap pengungkapan manajemen risiko. Pengungkapan risiko menjadi sebuah keharusan bagi perusahaan sebagai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap para pengguna laporan tahunan

perusahaan. Secara singkat ketentuan pengungkapan risiko di beberapa negara dijelaskan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Peraturan Pengungkapan Risiko di Beberapa Negara

Negara	Peraturan dan Tahun Terbit	Isi	Tempat
Australia	<i>ASX Corporate Governance Principles and Recommendations (Principles 7)</i>	Berisikan tentang pengakuan dan manajemen risiko.	Bagian praktik <i>Good Corporate Governance</i>
Canada	<i>The Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA)</i>	Bursa Mensyaratkan perusahaan mengungkapkan manajemen risiko.	Catatan atas akuntansi dan bagian manajemen, diskusi, dan analisis (MDA)
Jerman	<i>German Accounting Standards 5 (GAS5)</i>	Mensyaratkan informasi risiko diungkapkan dan dijelaskan terpisah dari laporan manajemen.	Terpisah dari bagian laporan manajemen
UK	<i>The Operating and Financial Review (OFR), 1993</i> <i>Combined Code on Corporate Governance, 1998</i>	OFR merekomendasikan perusahaan untuk mengungkapkan analisisnya mengenai risiko kunci dan pembahasan yang jelas atas tren di masa mendatang. LSE mensyaratkan perusahaan terdaftar untuk mengelola sistem pengendalian internal dan menjelaskan bagaimana sistem tersebut bekerja.	- -

		Pedoman ini menekankan pada kebutuhan prosedur manajemen risiko internal dan mendorong perusahaan untuk melaporkan risiko kuncinya.	
USA	<i>Financial Reporting Release No.48 (FRR 48), 1997</i>	FRR 48 mensyaratkan perusahaan yang terdaftar di bursa untuk mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang risiko pasar (kerugian potensial akibat perubahan yang merugikan pada tingkat bunga, tingkat mata uang asing, harga komoditas, dan harga ekuitas).	Catatan atas akuntansi dan bagian manajemen, diskusi, dan analisis (MDA)
Malaysia	<i>The Financial Reporting Act, 1997</i>	Bursa Malaysia mensyaratkan perusahaan terdaftar untuk menyertakan laporan tentang kondisi pengendalian internal, pengendalian risiko dan manajemen risiko, pencapaian dan prospek perusahaan secara keseluruhan, serta praktik <i>Corporate Governance</i> .	-

Sumber : Amran *et al.*, 2009; Lajili dan Zeghal, 2005

Pengungkapan risiko di Indonesia juga sudah mulai serius di laporkan, ini terbukti dari beberapa regulasi antara lain PSAK No 60 (revisi 2010) tentang instrumen keuangan, pengungkapan. Secara singkat ketentuan pengungkapan risiko di Indonesia diurai pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Peraturan Pengungkapan Risiko di Indonesia

Hal yang di atur	PSAK No. 60 (Revisi 2010)
Pengungkapan lainnya - Kebijakan akuntansi	Mengungkapkan kebijakan akuntansi dan dasar pengukuran sesuai PSAK 1 (revisi 2009): <i>Penyajian Laporan Keuangan</i> paragraf 72.
Nilai Wajar	Sehubungan dengan nilai wajar, hal-hal yang perlu diungkapkan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkapkan tiga level hirarki nilai wajar. 2. Jika ada perbedaan nilai wajar saat pengakuan awal dengan jumlah yang ditentukan menggunakan teknik penilaian pada tanggal itu, maka mengungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan akuntansi untuk pengakuan perbedaan b. Agregat perbedaan yang diakui dan rekonsiliasi perubahan saldo perbedaan.
Jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan	Mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi untuk mengevaluasi jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan
Pengungkapan Kualitatif	Mengungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksposur risiko dan bagaimana risiko timbul 2. Tujuan, kebijakan, proses pengelolaan risiko dan metode untuk mengukur risiko 3. Setiap perubahan (1) dan (2) dari periode sebelumnya
Pengungkapan Kuantitatif - Risiko kredit	Untuk setiap kelompok instrumen keuangan harus mengungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah paling mewakili nilai maksimal eksposur risiko kredit 2. Uraian agunan yang dimiliki sebagai jaminan dan peningkatan perikatan kredit 3. Informasi kualitas kredit aset keuangan yang lewat jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai 4. Jumlah tercatat aset keuangan telah jatuh tempo atau

	penurunan nilai setelah negosiasi
Pengungkapan Kuantitatif - Risiko likuiditas	Entitas harus mengungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa jatuh tempo untuk non-derivatif liabilitas keuangan 2. Analisa jatuh tempo untuk derivatif liabilitas keuangan 3. Uraian pengelolaan risiko likuiditas melekat pada (a) dan (b)
Pengungkapan Kuantitatif - Risiko Pasar - Analisa Sensitivitas	Mengungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar 2. Asumsi dan metode yang digunakan dalam analisa Sensitivitas 3. Perubahan asumsi dan metode analisa sensitivitas

Sumber : PSAK No 60 (Revisi 2010)

Pengungkapan risiko manajemen dikategorikan menjadi dua elemen yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib adalah informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal suatu negara. Setiap emiten atau perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek wajib menyampaikan laporan tahunan secara berkala dan informasi material lainnya kepada Bapepam dan publik.

Pengungkapan sukarela yaitu penyampaian informasi yang diberikan secara sukarela oleh perusahaan di luar pengungkapan wajib. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi yang melebihi persyaratan minimum dari peraturan pasar modal yang berlaku. Perusahaan memiliki keleluasaan dalam melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan sehingga menimbulkan adanya keragaman atau variasi luas pengungkapan sukarela antar perusahaan. Pengungkapan sukarela pada manajemen risiko terkait

dengan sistem pengendalian internal yang dimiliki perusahaan dengan menggunakan *COSO Framework*. Definisi pengendalian internal menurut COSO adalah sebagai sistem yang dirancang memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan informasi keuangan dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Model COSO terdiri atas lima komponen pengendalian internal :

1. Penilaian risiko (*Risk assessment*)
2. Pendalian lingkungan (*Control Environment*)
3. Pengendalian aktivitas (*Control Activity*)
4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)
5. Pemantauan (*Monitoring*)

2.1.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusional atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management* dan kepemilikan institusional lain). Kepemilikan institusional merupakan pemegang saham terbesar sehingga merupakan sarana untuk memonitor manajemen (Djakman dan Machmud, 2008). Kepemilikan institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya untuk transparansi kepada *stakeholders* untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan nilai perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga mempengaruhi harga saham perusahaan (Brancato dan Gaughan, 1991 dalam Fauzi, Mahoney, dan Rahman, 2007).

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan kepemilikan institusional dianggap mampu menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan kepemilikan institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusional atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusional lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak kepemilikan institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Menurut Shleifer and Vishny (dalam Barnea dan Rubin, 2005) bahwa *institutional investors*, dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan.

Penelitian Smith (1996) (dalam Suranta et al, 2003) menunjukkan bahwa aktivitas pengawasan institusional mampu mengubah struktur pengelolaan

perusahaan dan mampu meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Hal ini didukung oleh Cruthley et al., (dalam Suranta et al, 2003) yang menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan institusional mampu mensubstitusi biaya keagenan lain sehingga biaya keagenan menurun dan nilai perusahaan meningkat.

2.1.6 Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Pengertian Komisaris Independen sebenarnya berasal dari pengertian komisaris dalam Pasal 1 angka 5 UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan : ”Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan” (Surya dan Yustiavandana, 2006).

Pengaturan mengenai Komisaris Independen juga dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan lainnya yakni : Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 dalam Pasal 10 mengenai komposisi komisaris, dimana di dalam Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri BUMN tersebut menyatakan bahwa paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota Komisaris/Dewan Pengawas harus berasal dari kalangan diluar BUMN yang bebas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan terafiliasi
2. Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk di departemen, lembaga, dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir
3. Tidak bekerja di BUMN yang bersangkutan atau terafiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir
4. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada BUMN yang bersangkutan dan afiliasinya
5. Bebas dari kepentingan aktivitas bisnis atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Komisaris/Dewan Pengawas yang berasal dari kalangan diluar BUMN yang bersangkutan untuk bertindak atau berfikir secara bebas di lingkup BUMN.

Selain diatur dalam peraturan perundang-undangan, keberadaan Komisaris Independen juga telah diatur dalam Peraturan Bursa Efek Jakarta melalui Keputusan BAPEPAM No. Kep-316/BEJ/062000 pada tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang *listed* di Bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas. Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

2.1.7 Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris

Dewan komisaris yang efektif dapat memberikan fungsi pengawasan yang baik untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham dalam rangka menyalurkan kepentingan manajer dan pemegang saham. Raber (2003) menyarankan bahwa dewan komisaris harus terdiri dari orang yang memiliki pengetahuan tentang prosedur akuntansi maupaun keuangan. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk memberikan pengungkapan yang baik terhadap pemegang saham dan publik.

Berdasarkan *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI) dewan komisaris memegang peranan penting dalam implementasi *good corporate governance*, karena dewan komisaris yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Untuk menjamin pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan anggota dewan komisaris yang memiliki integritas, kemampuan, tidak cacat hukum dan independen serta yang tidak memiliki hubungan bisnis kontraktual ataupun hubungan lainnya dengan pemegang saham mayoritas pemegang saham pengendali dan dewan direksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menggunakan latar belakang pendidikan akuntansi anggota komisaris diharapkan akan lebih mengungkapkan informasi tentang manajemen risiko untuk meningkatkan citra perusahaan dan kredibilitas dari tim manajemen.

2.1.8 Pengalaman Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki peranan yang penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan praktek *Good Corporate Governance*. Dewan komisaris yang telah melayani dewan di suatu perusahaan untuk beberapa tahun mungkin telah mengembangkan kompetensi tata kelola yang lebih baik dengan memberikan tambahan pengetahuan dan keahlian untuk perusahaan dan dengan demikian diharapkan mampu dalam mengawasi manajemen (Abdul dan Mohamed, 2006).

Berdasarkan teori ketergantungan sumber daya, komisaris yang memiliki jaringan dengan pihak luar cenderung memiliki akses sumber daya eksternal dan hubungan seperti ini penting untuk memastikan peningkatan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, semakin banyak pengalaman komisaris miliki, semakin tinggi pengetahuan dan keahlian mereka sehingga diharapkan akan lebih mengungkapkan manajemen risiko.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengungkapan risiko telah banyak dilakukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Retno Angraini (2006), Almilia dan Retrinasari (2007), Sudarmadji dan Sularto (2007), Amran *et al* (2009), Hassan (2009), Ismail dan Rahman (2011), Windi Gessy Anisa (2012) dan masih banyak lagi penelitian tentang pengungkapan risiko. Angraini (2006) melakukan penelitian mengenai pengungkapan informasi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan,

dengan melakukan pengujian menggunakan sampel semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama tahun 2000-2004. Angraini (2006) menemukan beberapa variabel yang diujinya seperti kepemilikan manajemen berpengaruh secara signifikan dengan pengungkapan informasi sosial sedangkan variabel *financial leverage*, biaya politik dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan informasi sosial.

Almilia dan Retrinasari (2007) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan tahunan, dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 2001-2004 dengan menggunakan purposive sampling. Almilia dan Retrinasari (2007) menemukan beberapa variabel yang diujinya seperti rasio likuiditas, rasio *leverage*, ukuran perusahaan dan status perusahaan memiliki hubungan yang signifikan dengan kelengkapan pengungkapan laporan tahunan perusahaan sedangkan variabel rasio *net profit margin* tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kelengkapan pengungkapan laporan tahunan perusahaan.

Sudarmadji dan Sularto (2007) melakukan penelitian mengenai luas *voluntary disclosure* yang dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan struktur kepemilikan, dengan melakukan pengujian menggunakan sampel laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ dan laporan keuangan perusahaan yang memiliki tahun buku yang berakhir pada desember 31. Sudarmadji dan Sularto (2007) menemukan beberapa variabel yang di ujinya seperti variable ukuran

perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan tipe kepemilikan perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan dengan luas *voluntary disclosure*. Dari empat variabel yang diujinya semuanya mempunyai hubungan yang negatif terhadap luas *voluntary disclosure*.

Amran *et al* (2009) melakukan penelitian mengenai pengungkapan risiko dengan melakukan eksplorasi dari manajemen risiko. Amran *et al* (2009) melakukan pengujian dengan menggunakan sample 100 perusahaan non-keuangan di Malaysia. Amran *et al* (2009) menemukan ukuran perusahaan dan jenis industri (khususnya infrastruktur dan teknologi) memiliki hubungan yang signifikan dengan pengungkapan risiko dan sisanya variabel yang uji seperti diversifikasi produk, diversifikasi geografis dan *leverage* tidak berhubungan secara signifikan dengan pengungkapan risiko. Amran *et al* (2009) menggunakan ketentuan penelitian yang dikembangkan oleh Linsley dan Shrivies (2006) untuk mendefinisikan pengungkapan risiko.

Hassan (2009) melakukan penelitian mengenai karakteristik spesifik pengungkapan risiko perusahaan di UAE, dengan melakukan pengujian menggunakan sample 49 perusahaan yang terdaftar pada Dubai *Financial Market* di Dubai atau Abu Pasar Keamanan. Hassan (2009) menggunakan standar akuntansi, penelitian terdahulu dan kerangka kerja peraturan UAE untuk mengembangkan indeks pengungkapan risiko. Hassan (2009) menemukan beberapa variabel yang diujinya seperti rasio ukuran perusahaan dan cadangan perusahaan tidak berhubungan signifikan dengan tingkat pengungkapan risiko

perusahaan sedangkan variabel tingkat risiko perusahaan dan jenis industri berhubungan secara signifikan dengan tingkat pengungkapan risiko.

Ismail dan Rahman (2011) melakukan penelitian pengungkapan manajemen risiko di perusahaan Malaysia. Variabel yang digunakan adalah kepemilikan institusional dan karakteristik dewan komisaris. Untuk kepemilikan institusional, diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu sensitif dan tidak sensitif serta MSWG, sedangkan karakteristik dewan mengacu pada komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris dan pengalaman komisaris.

Anisa (2012) melakukan penelitian mengenai analisis faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko dengan melakukan pengujian menggunakan sampel laporan tahunan perusahaan-perusahaan pada non-keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010. Anisa (2012) menemukan variabel struktur kepemilikan publik berpengaruh secara signifikan dengan pengungkapan manajemen risiko.

Penelitian ini mereplikasi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ismail dan Rahman (2011) dan menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian ini. Hasil pada penelitian mereka menunjukkan hanya kepemilikan institusional dan latar belakang pendidikan dewan komisaris yang berhubungan signifikan dengan pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan pada penelitian ini pengalaman dewan komisaris memiliki hubungan yang signifikan dengan pengungkapan manajemen risiko. Secara singkat penelitian terdahulu tentang pengungkapan risiko diurai pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Research	Variabel		Obyek Respon
	Dependen	Independen	
Retno Angraini (2006)	Pengungkapan Informasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan manajemen 2. <i>Financial leverage</i> 3. Biaya politis 4. Profitabilitas 	Semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama tahun 2000-2004
Almilia dan Retrinasari (2007)	Kelengkapan pengungkapan laporan tahunan perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio likuiditas 2. Rasio <i>leverage</i> 3. Rasio <i>net profit margin</i> 4. Ukuran perusahaan 5. Status perusahaan 	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 2001-2004
Sudarmadji dan Sularto (2007)	Luas voluntary disclosure	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran perusahaan 2. Profitabilitas 3. <i>Leverage</i> 4. Tipe kepemilikan perusahaan 	Laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ dan laporan keuangan perusahaan yang memiliki tahun buku yang berakhir pada desember 31
Amran et al (2009)	Pengungkapan manajemen risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diversifikasi produk 2. Diversifikasi geografis 3. Ukuran perusahaan 	100 perusahaan non-keuangan di Malaysia

		4. Jenis industri 5. Tingkat <i>leverage</i>	
Hassan (2009)	Luas karakteristik pengungkapan risiko	1. Ukuran perusahaan 2. Tingkat risiko perusahaan 3. Jenis industri 4. Cadangan perusahaan	49 perusahaan yang terdaftar pada Dubai <i>financial market</i> di Dubai atau Abu pasar keamanan.
Ismail dan Rahman (2011)	Pengungkapan Risiko Manajemen	1. <i>Pressure Sensitive</i> 2. <i>Pressure Insensitive</i> 3. <i>MSWG</i> 4. <i>Non-Executive Director</i> 5. <i>Directors' Education</i> 6. <i>Directors' Experience</i>	124 perusahaan di Malaysia selama tahun 2006-2008
Windi Gessy Anisa (2012)	Pengungkapan Manajemen Risiko	1. Tingkat Leverage 2. Jenis Industri 3. Tingkat Profitabilitas 4. Ukuran Perusahaan 5. Struktur Kepemilikan Publik	Laporan tahunan perusahaan-perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010

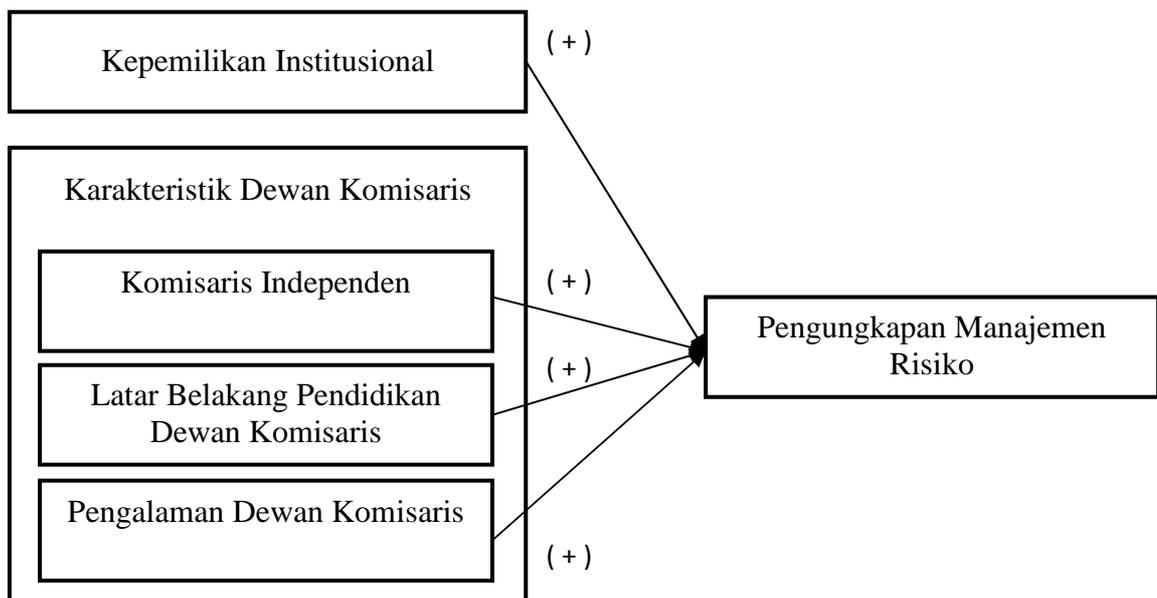
2.3 Kerangka Pemikiran

Pengungkapan risiko merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam PSAK No 60 (Revisi 2010), Banyaknya peraturan mengenai pengungkapan risiko di Indonesia menyimpulkan

Indonesia serius mengenai masalah pengungkapan risiko di perusahaan. Pengungkapan risiko sangat menguntungkan para investor dan pengguna laporan perusahaan, dengan adanya pengungkapan risiko para investor dan pengguna laporan keuangan dapat mengetahui risiko apa yang sedang terjadi dan mungkin akan terjadi dalam perusahaan tersebut. Sehingga dengan adanya pengungkapan risiko ini dapat membantu para investor dan pengguna laporan perusahaan untuk membantu dalam pengambilan keputusan.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



Penelitian ini menguji pengaruh kepemilikan institusional dan karakteristik dewan komisaris terhadap pengungkapan manajemen risiko. Penelitian ini menggunakan variabel dependen pengungkapan manajemen risiko. Variabel independen yang dipakai penelitian ini adalah kepemilikan institusional

dan karakteristik dewan komisaris yaitu dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan dewan komisaris, dan pengalaman dewan komisaris.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Investor institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi masalah keagenan karena mereka memegang sebagian besar saham dalam sebuah perusahaan serta mereka memiliki keahlian dan pengalaman dalam menjelajah di berbagai perusahaan (Abraham dan Cox, 2007). Menurut Lienbenberg dan Hoyt (2003) kepemilikan institusional memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan manajemen risiko perusahaan. Hal ini karena kepemilikan institusional membutuhkan lebih banyak informasi perusahaan agar mereka dapat membuat keputusan tentang portofolio investasi mereka (Solomon et al., 2000).

Penelitian terdahulu oleh Salo (2008) menyatakan bahwa kepemilikan institusional lebih memperhatikan perusahaan yang memiliki praktek *Good Corporate Governance* yang kuat dimana didalamnya terdapat pengungkapan risiko manajemen. Salo (2008) juga menyatakan bahwa kepemilikan institusional menghindari perusahaan yang memiliki praktek *Good Corporate Governanve* yang lemah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

H1 = Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

2.4.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Investor institusional diharapkan memiliki kemampuan untuk mengurangi masalah keagenan karena mereka memegang sebagian besar saham dalam sebuah perusahaan. Lienbenberg dan Hoyt (2003) menyatakan bahwa investor institusional memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan manajemen risiko perusahaan. Investor institusional memiliki hubungan yang jangka panjang dengan perusahaan sehingga membutuhkan informasi yang berkaitan dengan status perusahaan agar dapat membuat keputusan portofolio investasi mereka.

Penelitian terdahulu Ismail dan Rahman (2011) berpendapat bahwa berdasarkan teori keagenan peran komisaris independen sangat penting dalam pengawasan manajemen. Selanjutnya, teori ketergantungan sumber daya juga mendukung gagasan bahwa dewan komisaris independen sangat penting dalam memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

H2 = Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

2.4.3 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Menurut Raber (2003) dewan komisaris yang efektif, memiliki pengetahuan tentang prosedur akuntansi maupun keuangan. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka mampu untuk memberikan pengungkapan yang baik terhadap pemegang saham dan publik. Oleh karena itu latar belakang pendidikan merupakan faktor penentu penting untuk praktek pengungkapan (Haniffa dan Cooke, 2000).

Penelitian terdahulu Ghafar (2008) menemukan bahwa terdapat hubungan positif terhadap latar belakang pendidikan dewan komisaris. Ini dikarenakan dewan komisaris dengan pendidikan akuntansi maupun keuangan memiliki variasi ide dan strategi untuk perusahaan. Dewan komisaris yang terdiri dari individu yang memiliki latar belakang akademis di bidang akuntansi ataupun keuangan akan memilih untuk mengungkapkan informasi lebih detail untuk meningkatkan citra perusahaan perusahaan dan kredibilitas tim manajemen. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

H3 = Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

2.4.4 Pengaruh Pengalaman Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Berdasarkan teori ketergantungan sumber daya, semakin banyak pengalaman yang dimiliki komisaris, maka semakin tinggi pengetahuan dan

kemampuannya. Menurut Abdul dan Mohamed (2006) komisaris yang telah berpengalaman selama beberapa tahun di perusahaan dapat mengembangkan praktek *good corporate governance* dimana pengungkapan manajemen risiko termasuk didalamnya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

H4 = Pengalaman Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis melalui validitas teori atau pengujian aplikasi kepada teori tertentu. Ruang lingkup penelitian ini hanya membatasi pembahasannya pada pertanyaan apakah kepemilikan institusional dan karakteristik dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Penelitian ini mengambil sampel pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu pengungkapan manajemen risiko.

2. Variabel Independen

Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris, dan pengalaman komisaris.

3.1.2 Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan manajemen risiko. Pengungkapan risiko adalah pemberian informasi kepada pengguna laporan perusahaan dan pemegang saham, di dalamnya menjelaskan tentang peluang atau hambatan perusahaan yang akan mempengaruhi maupun yang telah mempengaruhi kegiatan dan tujuan perusahaan. Laporan mengenai pengungkapan risiko biasanya disajikan dalam laporan tahunan perusahaan (Anisa, 2012).

Mengacu pada PSAK No. 60 (Revisi 2010), pengungkapan manajemen risiko yang disyaratkan menyediakan informasi untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai tingkat risiko yang terkait dengan instrumen keuangan. Instrumen keuangan atau pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) terdiri dari :

1. Risiko mata uang (*Currency*) adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.
2. Risiko tingkat bunga atas nilai wajar (*Interest Rate*) adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan tingkat bunga pasar.
3. Risiko harga (*Price*) adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar. Risiko pasar tidak hanya mencakup potensi kerugian tapi juga potensi keuntungan.

4. Risiko kredit (*Credit*) adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.
5. Risiko likuiditas (*Liquidity*) adalah risiko dimana entitas akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan entitas untuk menjual aset.

Untuk pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), penelitian ini menggunakan sistem pengendalian internal dengan framework COSO. Berdasarkan PP No 60 tahun 2008 tentang Penerapan *Good Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memelihara *internal control*. Instrumen yang diapakai dalam penelitian ini yaitu :

1. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
Suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengella risiko usaha relevan.
2. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
Lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut.
3. Kegiatan/Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi,

rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset perusahaan.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, keuangan dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tabel 3.1

Jenis Risiko Berdasarkan Pengungkapan Wajib dan Sukarela

No.	Jenis Risiko
Pengungkapan Wajib (<i>Mandatory Disclosure</i>)	
1.	Risiko mata uang (<i>Currency</i>)
2.	Risiko tingkat bunga atas nilai wajar (<i>Interest Rate</i>)
3.	Risiko harga (<i>Price</i>)
4.	Risiko kredit (<i>Credit</i>)
5.	Risiko likuiditas (<i>Liquidity</i>)
Pengungkapan Sukarela (<i>Voluntary Disclosure</i>)	
6.	Penilaian Risiko (<i>Risk Assessment</i>)
7.	Lingkungan Pengendalian (<i>Control Environment</i>)
8.	Kegiatan/Aktivitas Pengendalian (<i>Control Activities</i>)
9.	Informasi dan Komunikasi (<i>Information and Communication</i>)

Sumber : PSAK No. 60 (Revisi 2010) dan PP No 60 tahun 2008

Pengukuran variabel dependen ini dengan menggunakan jumlah pengungkapan risiko yang disajikan dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan risiko ini dikelompokkan kedalam 9 (sembilan) jenis risiko yang diungkapkan oleh perusahaan dan kemudian di dalam tabel pengelompokkan risiko akan diberikan nilai 1 (satu) jika perusahaan tersebut melakukan pengungkapan risiko, dan jika tidak melakukan pengungkapan risiko diberikan

nilai 0 (nol). Jenis-jenis risiko yang digunakan untuk mengukur variabel independen penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1.

%Pengungkapan Risiko

$$= \frac{\text{Jumlah Pengungkapan Risiko Perusahaan}}{\text{Total Jenis Risiko}} \times 100\%$$

Pengelompokkan risiko menurut jenis risiko yang diungkapkan oleh manajemen risiko ini dapat dijadikan untuk mengetahui seberapa banyak kalimat pengungkapan risiko perusahaan dalam laporan tahunan. Milne dan Adler (dalam Amran *et al*, 2009) menyatakan, penggunaan kalimat sebagai dasar untuk pengkodean dikarenakan kalimat dinilai lebih dapat diandalkan daripada unit analisis lain. Penelitian ini juga melakukan perhitungan persentase pengungkapan risiko untuk menjelaskan berapa jumlah persentase pengungkapan yang telah dilakukan oleh perusahaan.

Tabel 3.2

Batasan Dalam Pengungkapan Risiko Perusahaan

No.	Batasan Dalam Pengungkapan Risiko Perusahaan
1.	Pengertian risiko dapat diartikan risiko baik, risiko buruk dan ketidakpastian.
2.	Kalimat yang dianggap sebagai pengungkapan risiko adalah jika pengguna laporan perusahaan diberi informasi tentang kesempatan atau prospek, atau tentang risiko, bahaya, kerugian hambatan yang telah atau akan berdampak pada perusahaan di masa depan.
3.	Pengungkapan harus secara eksplisit ditanyakan bukan ditandakan.

4.	Pengungkapan yang mengalami pengulangan akan dicatat sebagai kalimat pengungkapan risiko setiap kali hal tersebut didiskusikan.
5.	Jika sebuah pengungkapan terlalu samar untuk diidentifikasi, maka tidak akan sebagai pengungkapan risiko.

Sumber : Linsley dan Shrikes (2006)

Tabel 3.2 memperlihatkan batasan pengungkapan risiko yang dilaporkan oleh perusahaan agar tidak menimbulkan kekhawatiran bagi pihak perusahaan terhadap ancaman pesaing yang akan mengetahui kelemahan perusahaan tersebut, jadi pengungkapan risiko secara menyeluruh cenderung di hindarkan oleh perusahaan.

3.1.3 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari kepemilikan institusional, komisaris independen, latar belakang pendidikan dewan komisaris, pengalaman dewan komisaris.

3.1.3.1 Kepemilikan Institusional

Merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management* dan kepemilikan institusi lain) (Djakman dan Machmud, 2008). Kepemilikan institusional dalam penelitian ini menggunakan persentase kepemilikan saham institusi dengan kepemilikan lebih dari 5% yang dilihat dalam laporan tahunan perusahaan untuk tahun 2012. Apabila suatu perusahaan terdapat lebih dari satu kepemilikan institusi yang memiliki saham perusahaan, maka

kepemilikan saham diukur dengan menghitung total seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh kepemilikan institusional.

$$\% \text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Total Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

3.1.3.2 Komisaris Independen

Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga “*fairness*” serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para pemegang saham lainnya (Alijoyo dan Zaini, 2004). Dalam penelitian ini independensi dewan komisaris dinyatakan dalam presentase jumlah anggota komisaris independen pada dewan dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris (Subramaniam, et al., 2009).

$$\% \text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

3.1.3.3 Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris

Dewan komisaris yang efektif dapat memberikan fungsi pengawasan yang baik untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham dalam rangka menyalurkan kepentingan manajer dan pemegang saham. Raber (2003) menyarankan bahwa dewan komisaris yang efektif harus terdiri dari orang yang memiliki pengetahuan tentang prosedur akuntansi. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk memberikan pengungkapan yang baik terhadap

pemegang saham dan publik. Oleh karena itu latar belakang pendidikan merupakan faktor penentu penting untuk praktek pengungkapan (Haniffa dan Cooke, 2000).

%Latar Belakang Pendidikan Komisaris

$$= \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris yang Memiliki Pendidikan Akuntansi / Keuangan}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

3.1.3.4 Pengalaman Dewan Komisaris

Komisaris yang telah melayani dewan selama beberapa tahun mungkin telah mengembangkan *good corporate governance* dengan memberikan pengetahuan dan keahlian tambahan untuk perusahaan dan dengan demikian diharapkan mampu dalam pengawasan manajemen (Abdul dan Mohamed, 2006). Berdasarkan teori ketergantungan sumber daya, komisaris yang memiliki hubungan dengan pihak luar cenderung memiliki akses ke sumber daya eksternal dan hubungan tersebut penting untuk memastikan peningkatan kinerja. Oleh karena itu, semakin banyaknya pengalaman yang dimiliki komisaris, maka semakin tinggi akan pengetahuan dan kemampuannya.

%Pengalaman Komisaris

$$= \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris yang telah melayani lebih dari 3 tahun}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012. Penelitian ini menggunakan

populasi 387 perusahaan non-keuangan yang diperoleh dari laporan perusahaan yang terdaftar di BEI. Setelah itu untuk mendapatkan sampel, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu sampel dipilih berdasarkan ketersediaan informasi dan kesesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Kriteria-kriteria sampel penelitian ini yaitu :

1. Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012
2. Perusahaan yang mengungkapkan *voluntary disclosure*
3. Perusahaan yang menampilkan informasi mengenai dewan komisaris secara lengkap
4. Perusahaan yang menampilkan *annual report* secara lengkap

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel tersebut, maka sampel akhir yang didapat berjumlah 77 perusahaan non-keuangan tahun 2012.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari eksternal yang umumnya disusun oleh suatu entitas selain peneliti dari organisasi yang bersangkutan. Data sekunder oleh perusahaan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012.

Pemilihan penggunaan 1 (satu) tahun laporan tahunan karena kebijakan yang mengatur tentang pengungkapan di Indonesia cenderung konstan, dan

pemilihan laporan tahun 2012 dikarenakan laporan tersebut baru diterbitkan sehingga dapat mencerminkan kondisi pengungkapan risiko yang terjadi sekarang. Dengan demikian pemilihan laporan tahun 2012 diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang relevan untuk menggambarkan kondisi aktual mengenai praktik pengungkapan risiko di Indonesia. Laporan tahunan diperoleh dari berbagai sumber yaitu dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai metode untuk pengumpulan data. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter seperti laporan tahunan perusahaan yang di jadikan sampel dalam penelitian. Proses penggunaan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan dan meringkas data yang terkait dengan penelitian. Tahapan selanjutnya dilakukan penelusuran dan pencatatan informasi pengungkapan manajemen risiko pada laporan tahunan yang terkait penelitian.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis data adalah suatu tehnik atau prosedur untuk menguji hipotesis penelitian. Metode ini menggunakan pengujian seperti, analisis statistik deskriptif, uji korelasi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum,

sum, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2006). Analisis statistik deskriptif digunakan hanya untuk penyajian dan penganalisisan data yang disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan pengukuran *mean*, standar deviasi, maksimum, dan minimum untuk statistik deskriptif.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah data dalam penelitian telah memenuhi kriteria asumsi klasik. Tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk menghindari estimasi yang biasa karena tidak semua data dapat diterapkan dengan melakukan analisis regresi. Ada tiga uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel-variabel memiliki distribusi normal. Data yang terdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan *one sample kolmogorov-smirnov test* dan analisis grafik histogram dan P-P plot. Dalam uji *one sample kolmogorovsmirnov test* variabel-variabel yang mempunyai *asympt. Sig (2-tailed)* di bawah tingkat signifikan sebesar 0,05 maka diartikan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki distribusi tidak normal dan sebaliknya (Ghozali, 2007).

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, maka uji jenis ini hanya diperuntukan untuk penelitian yang memiliki variabel independen lebih dari satu. Multikolinieritas dapat dilihat dengan menganalisis nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Suatu model regresi menunjukkan adanya multikolinieritas jika :

1. Nilai Tolerance $< 0,10$, atau
2. Nilai VIF > 10 .

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2007).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Model regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, latar belakang pendidikan dewan komisaris, pengalaman dewan komisaris, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan manajemen risiko. Model regresi yang

dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

$$PMRS = \beta_0 + \beta_1 KPINS + \beta_2 KSIND + \beta_3 KSPDD + \beta_4 KSPLM + \beta_5 LNNTA \\ + \beta_6 DTA + \beta_7 IDT + \epsilon$$

Keterangan :

β	=	Koefisien regresi
PMRS	=	Pengungkapan Manajemen Risiko
KPINS	=	Kepemilikan Institusional
KSIND	=	Komisaris Independen
KSPDD	=	Pendidikan Dewan Komisaris
KSPLM	=	Pengalaman Dewan Komisaris
ϵ	=	Error Term

3.5.4 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi tingkat 0.05 (alpha = 5%). Variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen jika signifikansi < 0.05 maka hipotesis penelitian akan diterima (koefisien regresi signifikan), tetapi jika variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

variabel dependen maka akan memiliki tingkat signifikansi >0.05 maka hipotesis penelitian akan ditolak (koefisien regresi tidak signifikan).

3.5.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi R^2 untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah antara 0 dan 1. Jika variabel uji R^2 memiliki nilai 0 atau mendekati 0, berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen mengalami keterbatasan, tetapi jika variabel uji R^2 memiliki nilai 1 atau mendekati satu maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

3.5.6 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi tingkat 0.05 ($\alpha = 5\%$). Secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen jika nilai signifikansi < 0.05 maka hipotesis penelitian diterima (koefisien regresi signifikan), tetapi jika secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen maka tingkat nilai signifikan > 0.05 maka hipotesis penelitian ditolak (koefisien regresi tidak signifikan).

3.5.7 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang berdasarkan analisis data yang telah dihasilkan. Uji hipotesis berhubungan dengan penerimaan atau penolakan suatu hipotesis. Penerimaan maupun penolakan suatu hipotesis berdasarkan analisis data yang telah dihasilkan.